

VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2024

Diterima: 8 Desember 2023

Direvisi: 15 Desember 2023

Disetujui: 2 Januari 2024

ANALISIS PROBLEMATIKA PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA MELALUI EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

Michelle Helena Titoni¹, Gaviatha Althaf Osbaldi², Azka Khairani³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Email: michellehelena04@gmail.com¹, gaviatha06@gmail.com², azkakhairani27@gmail.com³

ABSTRACT

Stunting is a condition of malnutrition associated with factors such as poverty, poor maternal health, inadequate diet, and inappropriate care that can hinder a child's physical and cognitive development. This journal discusses the problem of handling stunting in Indonesia through government policy analysis by observing several problems in the implementation of the program. This analysis includes the inaccuracy of budget allocations and the lack of supervision of the APBN and APBD so that stunting handling policies are not targeted and a waste of budget. The purpose of this study is to identify factors that influence the failure of the stunting handling program and provide alternative policies in the form of suggestions.

Keywords: *Stunting, Treatment Failure, Policy Analysis, Budget Allocation, Monitoring*

ABSTRAK

Stunting adalah kondisi kekurangan gizi yang terkait dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, kesehatan ibu yang buruk, pola makan yang tidak memadai, dan perawatan yang tidak sesuai yang dapat menghambat pengembangan fisik dan kognitif anak. Jurnal ini membahas permasalahan penanganan *stunting* di Indonesia melalui analisis kebijakan pemerintah dengan mengamati beberapa permasalahan dalam implementasi program tersebut. Analisis ini mencakup ketidaktepatan alokasi anggaran dan kurangnya pengawasan terhadap APBN dan APBD sehingga kebijakan penanganan *stunting* tidak tepat sasaran dan terjadi pemborosan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan program penanganan *stunting* dan memberikan alternatif kebijakan berupa saran.

Kata Kunci: *Stunting, Kegagalan Penanganan, Analisis Kebijakan, Alokasi Anggaran, Pengawasan*

PENDAHULUAN

Stunting, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, merupakan tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Untuk mengatasi problematika ini, pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan untuk menangani *stunting* dengan mengeluarkan anggaran yang besar. Namun, baru-baru ini banyak media yang mengungkap bahwa implementasi penggunaan anggaran tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga memengaruhi efektivitas dan keberhasilan kebijakan penanganan *stunting*. Presiden Joko Widodo mengungkapkan keprihatinan mengenai alokasi anggaran penanganan *stunting* dalam APBD yang tidak sesuai dengan prioritas utama.

Alokasi anggaran tidak tepat sasaran karena sebagian dana dialokasikan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kepentingan administratif lainnya, bukan untuk kebutuhan langsung anak-anak yang mengalami *stunting*. Selain itu, juga ditemukan beberapa daerah menggunakan anggaran *stunting* untuk kegiatan yang tidak relevan dengan penanganan *stunting*, seperti rehabilitasi bangunan, atau bahkan pembelian motor trail. Permasalahan ini memberikan gambaran bahwa efektivitas kebijakan penanganan *stunting* masih rentan terhadap pemborosan dan ketidaksesuaian tujuan utama kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam penanganan *stunting* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut dan memberikan saran perbaikan supaya program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan paper ini adalah metode argumentative dengan telaah beberapa jurnal sebagai acuan. Serta mencoba menganalisis Kebijakan kebijakan pemerintah terkait dengan perbaikan gizi diantaranya yaitu: (1) Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi, (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat, (3) Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Presiden Joko Widodo mengungkapkan keprihatinan terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak tepat sasaran, khususnya terkait penanganan *stunting*. Dalam konteks ini, Jokowi menyoroti daerah yang menganggarkan dana penanganan *stunting* sebesar Rp 10 miliar, namun mayoritas dana tersebut digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Menurut Jokowi, anggaran tersebut seharusnya lebih efektif jika dialokasikan untuk pembelian bahan pangan seperti telur, susu, ikan, daging, dan sayuran yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan administratif yang tidak berdampak langsung pada penanganan *stunting*.

Jokowi dengan tegas mengkritik penggunaan dana penanganan *stunting* yang tidak sesuai dengan prioritas utama. Beliau menekankan pentingnya mengalokasikan dana tersebut secara bijak untuk memastikan bahwa bantuan langsung menuju kepada kelompok masyarakat yang memerlukan, seperti balita yang mengalami *stunting*. Jokowi juga mengemukakan pertanyaan retorik, "Kapan *stunting*nya akan selesai kalau caranya seperti ini?" mengindikasikan keprihatinan atas kurangnya efektivitas kebijakan penanganan *stunting* yang dilaksanakan oleh beberapa daerah.

Presiden Jokowi menggambarkan sebuah kasus di mana suatu daerah mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar untuk membangun dan merehabilitasi balai. Namun, sebagian besar dana tersebut ternyata digunakan untuk kepentingan administratif seperti honor pegawai, rapat, dan perjalanan dinas. Jokowi menilai bahwa prioritas penggunaan dana ini seharusnya difokuskan pada kegiatan rehabilitasi yang mendukung upaya penanganan *stunting*. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti ketidaksesuaian antara alokasi anggaran yang ditentukan dan penggunaan sesungguhnya di lapangan, yang dapat merugikan efektivitas program penanganan *stunting*.

Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengakui adanya penyalahgunaan anggaran *stunting* oleh pihak-pihak berwenang di daerah. Monoarfa mencatat bahwa pengalokasian dana *stunting* di daerah, setelah dicek melalui Sistem Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), menunjukkan bahwa anggaran kesehatan, khususnya untuk penanganan stunting, malah digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti pagar puskesmas dan pembelian motor trail. Pengakuan ini menunjukkan bahwa evaluasi dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan stunting.

Dalam menanggapi permasalahan ini, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jokowi berpendapat bahwa BPKP harus terlibat secara serius dalam mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di seluruh lapisan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Poin ini mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat lembaga pengawas keuangan guna memastikan bahwa alokasi anggaran yang signifikan untuk penanganan stunting benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan. Jokowi menekankan agar pengawasan difokuskan pada orientasi hasil, menegaskan bahwa alokasi APBN dan APBD harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak boleh terbuang untuk kepentingan administratif yang tidak relevan dengan penanganan stunting.

Presiden Jokowi juga menyoroti kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran secara langsung di lapangan. Beliau menyatakan bahwa tanpa pengawasan yang cermat, risiko terjadinya penyalahgunaan dana tetap tinggi. Jokowi mengingatkan bahwa kelemahan dalam pengawasan dapat mengakibatkan pemborosan dan ketidaktepatan sasaran, sehingga mengurangi efektivitas program penanganan stunting secara keseluruhan.

Kritik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi mencerminkan urgensi untuk mengubah paradigma dalam penanganan stunting di Indonesia. Diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran penanganan stunting agar benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam konteks ini, peran BPKP menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk penanganan stunting benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, langkah konkret yang dapat diambil adalah memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*) terhadap penggunaan anggaran penanganan stunting di seluruh tingkatan pemerintahan. Penguatan sistem ini melibatkan peningkatan kemampuan dan kapasitas BPKP, serta penerapan teknologi informasi yang canggih untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data terkait penggunaan anggaran. Pemantauan yang efektif akan membantu mendeteksi potensi penyalahgunaan dana secara cepat, sehingga tindakan korektif dapat diambil dengan segera.

Selain itu, diperlukan reformasi dalam proses perencanaan anggaran di tingkat daerah. Proses ini harus lebih partisipatif, melibatkan stakeholder terkait, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran program penanganan stunting. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait secara aktif dalam perencanaan anggaran, diharapkan alokasi dana dapat lebih akurat sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penanganan stunting yang telah diterapkan. Evaluasi ini harus mencakup aspek efektivitas, efisiensi, dan dampak program. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan guna meningkatkan kinerja program penanganan stunting di masa yang akan datang.

Penting juga untuk melibatkan lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan penggunaan anggaran penanganan stunting. Keterlibatan pihak eksternal ini dapat memberikan perspektif independen dan memastikan

akuntabilitas penuh dalam pengelolaan anggaran. Pihak-pihak ini juga dapat berperan sebagai pengawas independen yang membantu memastikan bahwa program penanganan stunting berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan integritas.

Selain itu, perlu dibangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan stunting dan peran mereka dalam menjaga keberhasilan program ini. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, perawatan kesehatan anak, dan dampak stunting pada perkembangan anak perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mendukung program penanganan stunting dan memastikan keberlanjutan upaya ini dalam jangka panjang.

Dalam konteks peningkatan efektivitas penanganan stunting, penguatan sistem kesehatan juga menjadi hal yang krusial. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pemberian layanan kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan kapasitas petugas kesehatan ditingkat daerah menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan di daerah.

Penanganan stunting juga tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu faktor risiko stunting, sehingga upaya untuk mengurangi stunting juga harus disertai dengan program-program ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja merupakan langkah-langkah strategis dalam mengatasi akar permasalahan stunting.

Sebagai langkah konkret, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan stunting. Kolaborasi antar Kementerian, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait lainnya menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Penguatan koordinasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan koordinasi yang baik, sumber daya dapat dioptimalkan dan program penanganan stunting dapat berjalan secara lebih efektif.

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan stunting, pendekatan lintas sektoral juga menjadi penting. Keterlibatan seluruh sektor terkait, termasuk pendidikan, pertanian, sosial, dan ekonomi, diperlukan untuk menyusun strategi holistik yang dapat mengatasi akar permasalahan stunting. Kerjasama lintas sektoral ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim kerja lintas sektoral di tingkat pusat dan daerah, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dalam rangka menciptakan keberlanjutan program penanganan stunting, perlu dibangun kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, implementasi program, dan pemantauan hasil menjadi kunci keberhasilan program jangka panjang. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya penanganan stunting.

Dalam konteks internasional, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengatasi masalah stunting. Kerjasama internasional dapat melibatkan pertukaran ahli, transfer teknologi, dan dukungan finansial untuk memperkuat program penanganan stunting di Indonesia. Pembelajaran dari pengalaman negara-negara lain dapat membantu

Indonesia mengidentifikasi praktik terbaik dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani stunting.

Analisis problematika penanganan stunting di Indonesia melalui evaluasi kebijakan pemerintah menyoroti sejumlah permasalahan serius dalam pelaksanaan program tersebut. Dari ketidaktepatan alokasi anggaran hingga kurangnya pengawasan dan koordinasi, berbagai faktor mempengaruhi keberhasilan program penanganan stunting. Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya reformasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program penanganan stunting. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga pengawas menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap upaya penanganan stunting diarahkan dengan tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Analisis terhadap problematika penanganan stunting di Indonesia melalui evaluasi kebijakan pemerintah telah mengungkap sejumlah permasalahan kritis yang mempengaruhi efektivitas program. Faktor-faktor seperti ketidaktepatan alokasi anggaran, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan dana menunjukkan perlunya reformasi dalam pendekatan penanganan stunting. Secara keseluruhan, temuan ini mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia dalam mencapai tujuan penurunan angka *stunting* sesuai target nasional. Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan keprihatinan terhadap alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran sebagai bentuk kritik terhadap penggunaan dana yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi justru digunakan untuk kepentingan lain yang tidak relevan. Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, perlu adanya penguatan sistem pemantauan dari instansi atau badan yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran penanganan *stunting* dialokasikan secara efektif sehingga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang memerlukan.

DAFTAR PUSATAKA

- Momen Menkeu Sri Mulyani Heran, Ganti Pagar Puskesmas Pakai Anggaran Stunting - Page 3 – Health Liputan6.com
- Geramnya Jokowi, Anggaran Stunting Rp 10 Miliar, Dipakai Rapat dan Perjalanan Dinas Rp 6 M (kompas.com)
- Ampun! Dana Stunting Dipakai Bangun Pagar & Beli Motor PNS (cnbcindonesia.com)
- <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jfbd/article/view/1348/1088>
- <https://pustaka.bunghatta.ac.id/index.php/465-apa-itu-literasi-digital-pengertian-prinsip-manfaat-tantangan-dancontoh>
- https://www.who.int/health-topics/malnutrition#tab=tab_1
- <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/110>
- <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/dok-keg-sekretariat-id/2574-keterbukaan-informasi-publik-kunci-sukses-penyelenggaraan-diklat-yang-efektif-dan-transparan.html>
- <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/download/1336/pdf>
- <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132310001/pendidikan/Bab+6.+Decision+making.pdf>
- <https://fisip.umsu.ac.id/2023/06/06/metode-evaluasi-kebijakan-publik-pendekatan-dan-tantangan/>
- [https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/NSKAH%20FIX%20ERICK%20\(1\)%20pdf.pdf](https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/NSKAH%20FIX%20ERICK%20(1)%20pdf.pdf)